

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil analisis terhadap realisasi anggaran satker K/L di Kabupaten Pasaman Barat pada TA. 2014-2015:

1. Analisis realisasi anggaran TA 2014 dan 2015 menunjukkan:
  - a. Pola penyerapan anggaran belanja yang kecil di awal tahun anggaran dan penumpukan realisasi anggaran terjadi di semester ke-dua. Realisasi meningkat pada bulan Juli dan Desember. Secara kumulatif, realisasi semester I Tahun 2015 lebih rendah di banding realisasi semester I Tahun 2014.
  - b. Terjadi keterlambatan realisasi anggaran pada beberapa satuan kerja K/L di Kabupaten Pasaman Barat. Keterlambatan tersebut diukur dari tingkat penyerapan anggaran belanja pada akhir triwulan ketiga dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Jika dianalisis per satker, terdapat 14 dari 32 satker atau 43,75% mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada tahun 2014 dengan persentase 47,15% dari anggaran DIPA, sedangkan 19 dari 35 satker atau 54,28% mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada tahun 2015 dengan persentase 56,88% dari anggaran DIPA. Penyebab realisasi semester I TA 2015 lebih rendah dari TA 2014 adalah karena adanya perubahan Nomenklatur dan APBN-P di pemerintahan pusat.

c. Secara umum, masing-masing satuan kerja K/L di Kabupaten Pasaman Barat belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Sehingga realisasi anggaran cenderung dilaksanakan tidak berdasarkan pada rencana penarikan dana yang ada di Halaman III DIPA dan *update* rencana penarikan kas yang dilakukan masih terdapat deviasi/ tidak akurat.

2. Permasalahan dalam tahapan proses realisasi anggaran yang mempengaruhi penyerapan anggaran satker terutama terjadi pada tahapan proses realisasi anggaran belanja di satker. Berbagai permasalahan yang ditemui seperti:

a. Pelaksanaan perencanaan pencairan

- Dalam penyusunan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA, satker hanya mengandalkan proses kerja aplikasi yang ada yaitu aplikasi RKA-K/L.
- Satker cenderung melakukan pencairan sesuai dengan kebutuhan saja.
- Masih ada satker yang mengalami pemblokiran DIPA

b. Administrasi.

- Kesalahan dalam dokumen DIPA, sehingga DIPA tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Keterlambatan dalam proses revisi DIPA.

c. Sumber daya manusia.

- Tidak mencukupinya pejabat pengadaan yang bersertifikat
- Adanya keengganan staf untuk menjabat sebagai pejabat pengadaan karena tidak seimbang resiko dengan imbalan yang diterima
- Adanya *double* fungsi dalam pelaksanaan pekerjaan.

- d. Ganti uang persediaan; kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tetapi belum diganti melalui Ganti UP (GUP).
- e. Faktor lainnya, seperti regulasi (perubahan nomenklatur dan APBN-P yang dimulai dari anggaran pemerintah pusat), komitmen organisasi dan sebagainya yang berkaitan dengan realisasi anggaran.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, saran yang dapat penulis berikan untuk dapat meningkatkan realisasi anggaran satker K/L di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

- a. Penyusunan RKA-K/L seharusnya dilakukan oleh satuan kerja sebaik mungkin, sehingga revisi DIPA dapat diminimalkan.
- b. Realisasi anggaran seharusnya disesuaikan dengan rencana penarikan yang ada di dalam Halaman III DIPA dan *update* Rencana Penarikan Dana (RPD) Kas Harian, Mingguan dan Bulanan.
- c. Pemisahan fungsi yang tegas antara unit akuntansi keuangan dengan layanan pengadaan barang/jasa sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada masing-masing fungsi.
- d. Adanya komitmen dari Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola anggaran untuk mematuhi perencanaan kegiatan terkait dengan anggaran yang telah disusun.
- e. Adanya komitmen Kementerian Negara/Lembaga untuk menyelesaikan Petunjuk teknis dan SK pembayaran kegiatan di awal tahun anggaran,

sehingga belanja yang terkait dapat dibayarkan sesuai dengan perencanaan penarikan dana.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang penulis miliki, antara lain:

- a. Penulis hanya menganalisis realisasi anggaran pada satuan kerja kementerian negara/lembaga yang merupakan Satker K/L dengan jenis kewenangan KD (kewenangan daerah) yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, tanpa memasukkan satker instansi daerah penerima dana pusat.
- b. Narasumber dari penelitian ini hanya pejabat pengelola anggaran yang ada di satuan kerja pelaksana anggaran. Penulis tidak melakukan wawancara dengan narasumber KPPN Lubuk Sikaping, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumbar dan pihak ketiga pengadaan Barang/jasa. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin fokus menganalisis realisasi anggaran dan faktor penyebab penumpukan realisasi pada satuan kerja.

### 5.4 Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan bagi pimpinan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan anggaran dimasa yang akan datang.